

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan suatu tindakan nyata yang wajib dilakukan oleh setiap elemen masyarakat, untuk berusaha menjaga kesehatan individu maupun kesehatan suatu kelompok, yaitu berupa upaya kesehatan. Upaya kesehatan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014, tentang Kesehatan, adalah setiap dan / atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan / atau masyarakat secara menyeluruh, terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Upaya yang terpadu dan terintegrasi, dimaksudkan bahwa dalam melakukan suatu upaya kesehatan, masyarakat harus berhubungan dengan berbagai elemen kesehatan, seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri.

Tenaga kesehatan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014, tentang Kesehatan, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan

serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang diakui secara sah dalam undang-undang adalah Apoteker. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker, dan telah melaksanakan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu pekerjaan kefarmasian. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pasal 1 (1), Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusi atau penyaluran obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Selain Pekerjaan Kefarmasian, seorang Apoteker juga dituntut untuk melakukan Pelayanan Kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian, seperti yang didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pasal 1 (4), adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan,

Dalam menjalankan praktek di lapangan, seorang Apoteker wajib memiliki standar baku pelayanan kefarmasian yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan

tugasnya. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek, mendefinisikan Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengolahan obat (*drug oriented*), berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik (*patient oriented*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Karena itu, Apoteker dituntut untuk meningkatkan, pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Fasilitas pelayanan kesehatan, merupakan tempat Apoteker menjalankan tugasnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas Kesehatan disini, salah satu contohnya adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek, menjabarkan Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai; dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi, pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun

2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian di Apotek diselenggarakan oleh Apoteker, dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktik atau Surat Izin Kerja.

Berdasarkan uraian singkat diatas, diketahui bahwa peran, fungsi dan tanggung jawab seorang Apoteker sangat penting berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan apotek sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang calon apoteker, maka dibutuhkan suatu pengalaman langsung dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek, seperti yang diatur dalam Undang-Undang, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek, melalui Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA).

PKPA ini dilaksanakan mulai tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015 di Apotek Kimia Farma 603, Jl Akhmad Yani no. 119, Gedangan-Sidoarjo, dengan Apoteker Penanggungjawab Apotek adalah Fatmawati Wardhani, S. Farm, Apt.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

- 1.2.1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
- 1.2.2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

- 1.2.3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- 1.2.4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.